Daftar Isi

MahkamahKonstitusi Austria 1
SejarahKetatanegaraan 1
Warisan Konstitusi 1867 5
Komposisi Mahkamah Konstitusi 7
"Constitutional Review" 8
Kekuasaan Mahkamah Konstitusi 14
"Preventive Review" 18
Uji Konstitusionalitas Undang-undang 19
Uji legalitas Peraturan Pemerintah 19
DikotomiPutusan 20
Uji Formal Konstitusi 25
Kewenangan Khusus Administratif 26
GugatanPerorangan 31
Penyerahan Perkara dari Peradilan Umum 32
Penanganan Perkara 35

Mahkamah Konstitusi Negara Federal Jerman 37
Sejarah Ketatanegaraan 37
Organisasi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman 43
Kompetensi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman 47
Perselisihan Konstitusional 49
Pengendalian Norma Abstrak 50
Pengendalian Norma Konkrit 61
Gugatan Perorangan 72

Mahkamah Konstitusi Italia 77
Sejarah Ketatanegaraan 77

Pembentukan Mahkamah Konstitusi 81
Organisasi dan Mekanisme Pangangkatan Hakim 86
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Italia 92
"Abstract Review" 94
"Concrete Review" 98
Putusan Interpretatif 102
"Repporteur" Perkara 104

***Council of Grand Justice* Taiwan** 107
Sejarah Ketatanegaraan 107
Formasi "Council of Grand Justices" 115
Kewenangan "Council of Grand Justices" 120
Pengujian Konstitutional oleh "Grand justices" 126
Sengketa Antarlembaga Negara 128
Hubungan "Council" dan "Supreme Court" 130

Dewan Konstitusi Perancis 135
Sejarah Ketatanegaraan 135
Hirarki Norma Hukum dan Pelaksanaan "Constitutional Review" 142
Dewan Konstitusi di bawah Konstitusi Republik Kelima 147
Komposisi dan Metode Rekruitmen 151
Kewenangan Dewan Konstitusi 153
"A Priori Abstract Review" 156
Mekanisme Internal dalam Menangani Perkara 168
Gradasi Konstitusionalitas 171

Mahkamah Konstitusi Hongaria 175
Sejarah Ketatanegaraan 175
Pembentukan Mahkamah Konstitusi 178
Organisasi dan Prosedur Mahkamah Konstitusi 182
Kewenangan Mahkamah Konstitusi 185

"A Posteriori Review" 186
"Preventive Review" 192
Uji Undang-undang guna Disesuaikan dengan Perjanjian Internasional 196
Menentukan Kelalaian Tidak Konstitusional dalam Membentuk Undang-undang 197
Gugatan Konstitusional 200
Interpretasi Konstitusi 201

Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia 205
Sejarah Ketatanegaraan 205
Komite Supervisi Konstitusional 209
Pembentukan Mahkamah Konstitusi 211
Organisasi dan Prosedur dalam Mahkamah Konstitusi 213
Kewenangan Mahkamah Konstitusi 215
"Abstract Review" 220
Dikotomi Putusan 223
"Concrete Review" 226
Koreksi atas Ketidaktelitian Putusan Mahkamah 229
Gugatan Perorangan 230
Hak Untuk Mengajukan Permohonan Interpretasi Konstitusi 231

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan 233
Sejarah Ketatanegaraan 233
Organisasi Mahkamah Konstitusi 238
Kewenangan Mahkamah Konstitusi 239
Gradasi Putusan Mahkamah Konstitusi 242
Permohonan Individual 247
Hubungan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 249
Perkara Chun Doo-Hwan dan Roh Tae-woo 255
Mahkamah Konstitusi dan "Rule of Law" 256

Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan 259
Sejarah Ketatanegaraan 259
Mahkamah Konstitusi di bawah Konstitusi Sementara 262
Konstitusi Final 266
Organisasi Mahkamah Konstitusi 271
Kewenangan Mahkamah Konstitusi 274
"Abstract Review" 275
Permohonan dari Pengadilan Umum selain Mahkamah Agung 278
Banding atas Putusan "Supreme Court" 281
Sertifikasi Konstitusi Provinsi 283
Pengaduan Konstitusional 283

Mahkamah Konstitusi Thailand 287
Sejarah Ketatanegaraan 287
Pembentukan Mahkamah Konstitusi 291
Kewenangan Mahkamah Konstitusi 294
Kewenangan Memutus Konstitusionalitas Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang 296
Menentukan Konstitusionalitas Sebelum Undang-Undang Ditetapkan 301
Memutus Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Organik 302
Memutus Konstitusionalitas Peraturan Darurat Sebelum Ditetapkan oleh Dewan Kementerian 304
Memutus Konstitusionalitas Undang-Undang atau Rancangan Undang-Undang Organik, Seperti yang Diusulkan Kembali oleh Dewan Kementerian atau anggota "House of Representative" 306
Memutus Konstitusionalitas Setelah Rancangan Undang-Undang Diundangkan 307

Mempertimbangkan dan Memutus Kualifikasi Anggota "House of Representative", Anggota Senat, Kementerian, Komisi Pemilihan Umum, dan Setiap Pejabat yang Memangku Jabatan Politik Terkait dengan Laporan tentang Harta Kekayaannya 312
Mempertimbangkan Pemberhentian Anggota Kabinet Kementerian 314
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menimbang dan Memutus Perselisihan Antarlembaga Negara 315
Hak Mengajukan Petisi kepada Mahkamah Konstitusi 316
Gugatan Konstitusional 318

Daftar Pustaka 320
Indeks 330
Biodata Penulis 337